

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi salah satu elemen utama dan strategis dalam mencetak generasi bangsa yang harus diprioritaskan. Namun masih terdapat problematika di dalamnya, seperti mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mempunyai konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Maka tentu saja Negara dalam hal ini Pemerintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan.

Terciptanya pendidikan yang berkualitas merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan Nasional dan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan diri dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (MSDM) merupakan kebutuhan mendesak yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam menghadapi era globalisasi dimana perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Sesuatu yang harus diperhatikan dan menjadi pokok permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kinerja manajemen pendidikan, ditengarai salah satu faktor yang memiliki potensi dalam mempengaruhi dunia pendidikan yang meliputi berbagai sumber daya pendidikan yang terkait dengan mutu output yang dihasilkan.

Peningkatan mutu pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh efektifitas pengelolaan keuangan sekolah. Salah satu unsur pokok yang harus ada pada suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat menghasilkan anak didik (output pendidikan) yang baik adalah dari segi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah adalah hal yang sangat penting karena ada kait hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan sekolah. Komponen yang berkaitan dengan keuangan dan pembiayaan sekolah ini harus dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Pengelolaan adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien (Syafaruddin 2005: 45). Sedangkan Sebagaimana dalam Depdiknas (2000) dikemukakan, pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan

keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Zainuddin (2008: 128-129) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah disusun berdasarkan rencana-rencana yang jelas, misalnya dalam rencana jangka pendek, tertuang dalam program kerja konkret dan aplikatif untuk masa satu tahun pelajaran/anggaran keuangan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.

Anggaran keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam mengimplementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi

yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan demikian setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka menerapkan konsep MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara nasional merupakan tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat dan keluarga (orang tua peserta didik) dan sumber bantuan lainnya. Dalam PP RI Nomor 48 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dari undang-undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa sumber pembiayaan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat dan keluarga (orang tua peserta didik) dan sumber bantuan lainnya. Sumber-sumber biaya pada

sekolah dapat dibedakan dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, orang tua atau peserta didik dan masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat (Mulyasa, 2007: 47-48).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) tahun 2003 pasal 48 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik “. Oleh karena itu tujuan manajemen keuangan adalah: a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, b) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan c) meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah sedini mungkin.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sangat diperlukan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta mengelola dan memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. SMP N 4 Ngadirojo adalah Sekolah yang berada di pegunungan sebagai lanjutan dari SMP N satu atap dengan Sekolah Dasar, Jumlah siswanya sedikit berjumlah 168, sarana prasarananya masih dibawah Standar pelayanan minimal (SPM), input siswanya rendah, ada kelebihan guru bila dihitung dari Guru PNS dan GTT, guru PNS berjumlah 14 dan GTT 15. Dengan keadaan sekolah yang baru berdiri tahun 2006 dan sekolah tersebut masih dibawah SPM tentunya ada keunikan dalam proses pengelolaan keuangan di sekolah tersebut.

Berdasarkan keadaan dan keunikan SMP N 4 Ngadirojo di atas, walaupun sekolah kategori sekolah kecil dan dananya kecil tetapi dituntut target pemenuhan dan pelayanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang sama dengan sekolah-sekolah besar yang lainya. Menurut Kepala sekolah SMP N 4 Ngadirojo keadaan dana operasional sekolah yang kecil dan jauh dari perkotaan dalam hal operasional tertentu dituntut nilainya sama dengan sekolah yang besar bahkan melebihi dari sekolah yang lebih besar lainya. Contohnya operasional tranport dari sekolah ke kota kecamatan maupun kabupaten minimal sama bahkan melebihi dengan biaya transport sekolah yang lebih besar lainya, karena yang namanya tranportasi tergantung jarak tempuh dari sekolah ketempat tujuan. Jika sekolah yang besar mengelola 1 Lab IPA, 1 Ruang Perpustakaan, 1 R guru, dan fasilitas dasar lainya, SMP N 4 Ngadirojo Juga mengoperasionalkan 1 Lab IPA, 1 Ruang Perpustakaan dan ruang lainya yang menjadi basis ruang sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Jika penghitungan anggaran operasional SMP N 4 Ngadirojo dihitung berdasarkan Unit cost per siswa per tahun belum seimbang dengan total anggaran yang dikeluarkan, karena sekolah kecil maupun besar pada dasarnya ada kebutuhan basis yang sama yang harus dipenuhi. Sementara SMP N 4 Ngadirojo kemampuan sumbangan sukarelanya lebih kecil dibanding dengan sekolah lainya yang lebih besar jumlah siswanya.

Sekolah yang jumlah siswanya sedikit selalu ada masalah yaitu tentang minimnya sumber anggaran, salah satu contohnya adalah SMP N 4

Ngadirojo Pacitan. Dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dan sumbangan sukarela wali murid yang jumlahnya sedikit, pada hal dituntut pelayanan pendidikan yang sama dengan sekolah yang lebih besar jumlah siswanya. Menurut penulis perhitungan anggaran yang demikian tidak tepat karena sekolah harus ada kebutuhan minimal yaitu berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Oleh karena itu dalam menghitung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah harus menghitung dahulu kebutuhan basis sekolah sesuai SPM masing-masing sekolah ditambah biaya unit cost persiswa pertahun. Perhitungan Bantuan operasional yang tidak tepat ini akan memperlebar jurang perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah yang kecil dengan yang besar, sekolah di daerah pedesaan atau terpencil dengan sekolah yang ada di perkotaan. Jika kualitas pendidikan antara daerah satu dengan yang lain kualitasnya berbeda pada akhirnya banyak migrasi siswa dari pedesaan ke perkotaan karena pada dasarnya masyarakat ingin menyekolahkan putra putrinya di sekolah yang berkualitas . Di kota-kota menolak peserta didik baru didesa kekurangan peserta didik. Apabila keadaan ini dibiarkan terus oleh pemerintah akan berakibat ketidakadilan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat dan berimplikasi ketertinggalan tingkat kesejahteraan masyarakat antara wilayah yang maju dan wilayah yang masih tertinggal.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), terdapat 8 standar yang harus dikerjakan dan dicapai di sekolah salah satunya adalah standar biaya

pendidikan yang sangat erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan dan akan berpengaruh terhadap standar lainnya. Untuk memenuhi tuntutan pemenuhan 8 standar Nasional Pendidikan tersebut, bagi SMP N 4 Ngadirojo dengan dana yang minim perlu strategi yang tepat agar sekolah tetap berjalan sesuai tuntutan SPM dan SNP.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ” Strategi Pengelolaan Keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan”.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Strategi pengelolaan keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan. Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik penyusunan anggaran keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan?
2. Bagaimana karakteristik sumber keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan?
3. Bagaimana karakteristik pertanggung jawaban keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan karakteristik penyusunan anggaran keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan.

2. Mendeskripsikan karakteristik sumber keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan.
3. Mendeskripsikan karakteristik pertanggung jawaban keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Bagi SMP N 4 Ngadirojo Pacitan, hasil penelitian ini sebagai wacana teoretis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat merupakan sumbangsih pemikiran dan pengembangan ilmu dalam rangka untuk memajukan bangsa demi tercapinya tujuan pendidikan nasional yang lebih maju.

b. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman langsung berdasarkan teori yang ada dan diterapkan melalui penelitian yang dilaksanakan ini.

c. Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yang lebih bervariasi.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan keuangan

pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.

2. Sumber keuangan

Sumber keuangan merupakan ketersediaan jumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggaraan pendidikan. sumber-sumber biaya itu di klasifikasikan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain

3. RAPBS

RAPBS (rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah) adalah rancangan yang mengakumulasikan penerimaan dan penggunaan serta pengelolaan dana selama 1 tahun pelajaran